

Upaya Komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Resolusi Konflik Ahmadiyah

Nadia Wasta Utami

Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang Km. 14,5, Yogyakarta 55584
Email: syihabnadia@gmail.com

Abstract: *The Ahmadiyah conflicts in Indonesia often ended up tragically. However, in Tasikmalaya, some conflicts could be immediately diminished. This research tries to find communication effort conducted by FKUB of Tasikmalaya district in diminishing Ahmadiyah conflict during 2012-2014. Using qualitative descriptive research with in-depth interview and observation as the methods, this research reveals that FKUB's communication efforts include listening the aspirations from both parties, conducting survey, and research to approach Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) and concluding that conflict could be diminished through economic empowerment.*

Keywords: *Ahmadiyah, communication effort, conflict resolution*

Abstrak: *Konflik Ahmadiyah yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia umumnya berakhir tragis. Namun, di Tasikmalaya konflik dapat segera diredam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya komunikasi yang dilakukan FKUB Kabupaten Tasikmalaya dalam meredam konflik Ahmadiyah yang terjadi pada kurun waktu 2012-2014. Peneliti menggunakan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam dan observasi langsung saat terjadi konflik. Melalui penelitian ini terlihat bahwa upaya komunikasi FKUB dimulai dengan mendengarkan aspirasi kedua belah pihak, melakukan survei dan riset sebagai pendekatan kepada pihak Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), dan pemberdayaan di bidang ekonomi.*

Kata kunci: *Ahmadiyah, resolusi konflik, upaya komunikasi*

Ahmadiyah merupakan aliran yang mengikuti ajaran Mirza Ghulam Ahmad Al Qodiyani dan berdiri pada 23 Maret 1889. Menurut aliran ini, Nabi Muhammad SAW yang diyakini umat Islam sebagai *khatam an nabiyyin* (penutup para Nabi) bukan penghabisan para nabi, tetapi beliau hanya cap, stempel, materai, atau segel. Oleh karena itu, Ahmadiyah Qadiyani meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi setelah Nabi Muhammad. Hal ini sangat berseberangan dengan

ajaran Islam dan memicu pertentangan antara warga muslim dan Ahmadiyah di Indonesia. Melihat pertentangan tersebut, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Tahun 2008 yang memperingatkan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) untuk menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran Agama Islam (Soal Ahmadiyah, 2013).

Setelah keluarnya SKB Tiga Menteri tersebut, konflik yang menerpa JAI justru

semakin intens. Hal tersebut terlihat dari penyerangan massa beruntun terhadap JAI di beberapa daerah. Selama kurun waktu dua tahun (2008-2010), terjadi 276 kali kekerasan terhadap JAI. Kasus terbanyak terjadi pada 2008, yaitu 193 kasus atau 73 persen dari total kekerasan tahun itu. Pada 2009 dan 2010, Ahmadiyah mengalami kekerasan dan bentrokan sebanyak 33 dan 50 kali di berbagai daerah di Indonesia (Suprpto, Priatmojo, dan Al-Yamani, 2011).

Sebagian konflik berakhir tragis, seperti konflik di Cikeusik yang mengakibatkan tiga anggota JAI meninggal dunia dan konflik di Lombok yang mengakibatkan pengusiran JAI dari pemukimannya (Kontras, 2008, h. 11-13; Amrulloh, Mustain, dan Wardatun, 2010). Hal berbeda terjadi di Tasikmalaya. Setelah konflik meletus pada 2012-2013, Tasikmalaya, sebagai daerah yang memiliki pemukiman warga JAI terbesar kedua di Indonesia, mampu kembali menata daerahnya dan berdamai dengan konflik yang ada.

Kampung Tenjowaringin, Salawu, Tasikmalaya, memiliki kurang lebih 3000 jemaat dengan fasilitas 7 masjid, 17 langgar, dan 3 fasilitas pendidikan (TK Khadijah, SLTP AL Mursalim, dan SMU Al Wahid) yang menjadi wadah pengkaderan JAI khusus Tasikmalaya (Zulkarnain, 2005, h. 286). Konflik yang menimpa warga JAI Tenjowaringin memuncak pada 2012 dan awal 2013 serta berbuntut perusakan terhadap tempat ibadah JAI (Masjid Ahmadiyah, 2013).

Tasikmalaya yang dijuluki sebagai kota santri memiliki cara khas mengurai permasalahan daerahnya. Memiliki budaya

yang sangat kental dengan penghormatan kepada para ulama/kyai serta peran aktif aktor-aktor yang peduli terhadap konflik, Tasikmalaya menjadikan konflik segera dapat diredam. Salah satu aktor yang berperan penting dalam resolusi konflik Ahmadiyah adalah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Tasikmalaya.

FKUB dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. FKUB, dalam aktivitas resolusi konflik, melakukan berbagai upaya komunikasi pada dua pihak yang berkonflik. Komunikasi menjadi hal penting dalam suatu penyelesaian konflik. Walaupun hanya menjadi salah satu bagian proses resolusi konflik, tanpa adanya komunikasi yang efektif, kata damai akan semakin sulit dicapai (Nicholson, 1991). Upaya FKUB dalam resolusi konflik di Tasikmalaya tersebut memang tidak dapat menjamin konflik tak akan terjadi lagi. Namun, hal ini penting untuk diteliti karena upaya komunikasi tersebut dapat memberi contoh nyata dan menjadi harapan bagi penyelesaian konflik Ahmadiyah di daerah lain.

Resolusi Konflik Keagamaan

Di antara banyak konflik di Indonesia, konflik agama menjadi salah satu isu yang selalu hangat. Masyarakat Indonesia yang sangat beragam suku dan agamanya menjadi satu alasan logis atas tak pernah usainya konflik di bumi pertiwi ini. Konflik agama sebenarnya sangat ironis karena pada dasarnya agama selalu mengajarkan kebaikan, toleransi, dan saling menghormati antarmanusia. Menurut

Ahmad (1994, h. 34-37), beberapa faktor pendorong agama menjadi penyebab konflik, yaitu 1) Eksklusivitas sebagian pemimpin dan penganut agama, 2) Sikap tertutup dan saling curiga antaragama, 3) Keterkaitan yang berlebihan kepada simbol-simbol agama, 4) Agama yang merupakan tujuan berubah menjadi alat, dan, 5) Kondisi politik, sosial, dan ekonomi.

Nicholson (1991, h. 59) menyatakan bahwa “*Conflict resolution is the process facilitating a solution where the actors no longer feel the need to indulge in conflict activity and feel that the distribution of benefits in social system is acceptable*”. Ketika pihak yang berkonflik merasa sudah tidak perlu lagi melanjutkan konflik, resolusi konflik menjadi fasilitas terciptanya solusi. Resolusi konflik merupakan upaya meredam atau menyelesaikan konflik. Kriesberg (2006, h. 107) mendefinisikan resolusi konflik sebagai “*conducting conflicts constructively, even creatively*”. Hal itu berarti meminimalkan kekerasan akibat konflik, mengatasi permusuhan antarpihak yang berkonflik, membuat suatu hasil yang dapat diterima pihak-pihak yang berkonflik, dan suatu penyelesaian yang dapat dipertahankan.

Para peneliti, dalam proses penyelesaian konflik, menetapkan pendekatan manajemen konflik yang beragam. Menurut Littlejohn & Domenici (2007, h. 15), terdapat dua genre manajemen konflik, yaitu *adversarial methods* dan *alternative dispute resolution* (ADR). *Adversarial methods* cenderung lebih konfrontasional. Oleh karena itu, genre ini dipahami dalam tiga bentuk pendekatan, yaitu *litigation*, *diatribe*, dan *force*. Sementara itu,

ADR merupakan alternatif pilihan resolusi konflik yang disertai metode partisipasi pihak ketiga melalui pendekatan negosiasi, mediasi, dan *arbitrase*.

Pentingnya Komunikasi dalam Resolusi Konflik

“*At the heart of both conflict and resolution is communication. Communication is only one part of the resolution process but it is a critical part. Without effective communication, it is hard to do much about conflict*” (Nicholson, 1991, h. 59). Gambaran tersebut menekankan pentingnya komunikasi dalam suatu penyelesaian konflik. Komunikasi menjadi dua sisi mata pisau yang bisa bertindak sebagai sumber permasalahan dan penyelesaian konflik.

Strategi komunikasi merupakan paduan dari perencanaan dan manajemen komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi komunikasi mempunyai tiga tujuan utama (Effendy, 2003, h. 32). *Pertama, to secure understanding*, yaitu memastikan komunikasi mengerti pesan yang diterima. *Kedua, to establish acceptance*, yaitu apabila pesan telah dimengerti dan diterima, penerimaannya harus dibina. *Ketiga, to motivate actions*, yaitu kegiatan tersebut dimotivasi. Sama halnya dengan merumuskan strategi komunikasi umum, strategi komunikasi dalam konflik juga ditentukan oleh analisis target atau sasaran komunikasi, cara pemilihan dan penyampaian pesan yang tepat, cara penggunaan media yang dipilih, serta penentuan komunikasi atau sumber sebagai faktor penting dalam keberhasilan strategi komunikasi.

Moore dan Wood (dalam Fazzi, 2011, h. 88), menyatakan bahwa “*communication*

is the life blood of negotiation". Maksudnya, suatu kesepakatan dapat dicapai tidak hanya bergantung pada proses komunikasi dan pertukaran informasi, tapi juga keakuratan interpretasi informasi tersebut. Komunikasi sangat berperan dalam penyelesaian konflik dan negosiasi untuk tercapainya penyelesaian itu. Negosiasi, sebagai suatu proses, timbul melalui komunikasi antarpihak yang berkonflik atau para aktor yang menjadi pihak ketiga atau negosiator.

Komunikasi, dalam perannya sebagai penyeselai konflik, memiliki beberapa teknik (Effendy, 2003, h. 21). *Pertama*, teknik informatif, yaitu upaya penyelesaian konflik melalui penjelasan atau pengetahuan terhadap sasaran komunikasi. *Kedua*, teknik instruktif atau koersif, yaitu upaya penyelesaian konflik dengan lebih menekankan pada perintah atau paksaan. *Ketiga*, teknik persuasif, yaitu upaya penyelesaian konflik tanpa kekerasan. Persuasi didefinisikan sebagai proses memengaruhi pendapat, sikap, dan tindakan orang melalui manipulasi psikologis, sehingga seseorang dapat bertindak seperti atas kehendaknya sendiri (Rahmat, 2000, h. 52). Komunikasi persuasi merupakan suatu usaha mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan audiens untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Pruitt, Rubin & Kim (2004, h. 57), beberapa bentuk komunikasi dalam penyelesaian konflik dapat dipilih oleh aktor. *Pertama*, *contending*, yakni upaya penyelesaian konflik tanpa memerhatikan kepentingan orang lain. Pengguna strategi ini berupaya membujuk pihak lain menuruti keinginannya dan bersikukuh mempertahankan pendapatnya. Taktik

yang digunakan dalam strategi ini berupa ancaman, menjatuhkan penalti, atau melakukan tindakan yang mendahului pihak lain untuk menyelesaikan konflik tanpa sepengetahuan pihak lawan.

Kedua, *problem solving*, yaitu strategi mempertahankan pendapat sendiri sekaligus berusaha mendapatkan cara melakukan rekonsiliasi dengan pihak lain. Berbagai taktik yang digunakan dalam strategi ini, misalnya mengirim penengah yang dipercaya oleh kedua pihak, berkomunikasi melalui penghubung-penghubung tidak resmi, atau duduk bersama dalam suatu negosiasi.

Ketiga, *yielding*, yaitu strategi yang menyarankan salah satu pihak menurunkan aspirasinya tanpa menyerah total pada pihak lain. Strategi ini dimaksudkan untuk menurunkan tensi konflik dan mempermudah kesepakatan. Strategi ini juga dapat diikuti penggunaan strategi lain secara bersamaan, misalnya setelah melakukan *yielding*, pihak tersebut melakukan *problem solving*.

Keempat, *inaction* dan *withdrawing*. Keduanya melibatkan penghentian usaha untuk mengatasi kontroversi. Perbedaannya, *withdrawing* merupakan penghentian bersifat permanen, sedangkan *inaction* merupakan tindakan temporer yang tetap membuka kesempatan bagi upaya penyelesaian.

METODE

Objek penelitian ini adalah konflik melibatkan JAI yang terjadi di Tenjowaringin, Salawu, Tasikmalaya, beserta upaya komunikasi dalam resolusi konflik pada kurun waktu 2012-2014. Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif dengan

pendekatan kualitatif dan metode studi kasus sebab bertujuan memaparkan proses strategi komunikasi FKUB dalam resolusi Ahmadiyah dan bukan untuk mencari atau menjelaskan hubungan, serta tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi (Rahmat, 2001, h. 24). Studi kasus dipandang tepat sebagai metode penelitian ini karena lebih menyoroti strategi komunikasi, peran, dan perspektif FKUB dalam konflik Ahmadiyah di Tasikmalaya. Peneliti tidak dapat mengontrol adakah peristiwa dan konflik yang manifes di Tasikmalaya ini merupakan fenomena baru atau kontemporer, meskipun Ahmadiyah merupakan organisasi yang telah lama berkembang di Indonesia.

Data didapatkan dari wawancara mendalam kepada para pihak yang berkonflik. Narasumber wawancara adalah Doddy Kurniawan, Koordinator JAI Tenjowaringin 2009-2013, Acep Sopyan, Ketua FPI DWP Tasikmalaya, DR. K.H. Edeng Zaenal Abidin, M.Pd, Ketua FKUB Kabupaten Tasikmalaya, Wahyu, Anggota FKUB, K.H. Drs. Ii Abdul Basith, Ketua MUI Kabupaten Tasikmalaya, AKBP. Wijonarko, Kapolres Kabupaten Tasikmalaya, serta Asep & Tatang, warga non-JAI di Salawu, Tasikmalaya. Hasil wawancara tersebut memberikan data mengenai proses dan pelaksanaan upaya komunikasi FKUB dalam resolusi konflik Ahmadiyah.

Selain itu, observasi dan studi dokumentasi menjadi cara pengumpulan data penunjang penelitian. Observasi dilakukan di lokasi kerusakan pascakonflik pada proses perencanaan dan pelaksanaan upaya

komunikasi FKUB, seperti rapat koordinasi FKUB, silaturahmi FKUB dengan warga JAI, dan kerja sama FKUB, Front Pembela Islam (FPI), dan JAI dalam mengelola kolam ikan. Adapun data studi dokumentasi berupa dokumen-dokumen milik FKUB, seperti data mengenai jumlah anggota JAI di Tasikmalaya, foto-foto konflik Ahmadiyah di Tasikmalaya, dan berbagai peraturan bupati dan pejabat tentang Ahmadiyah.

HASIL

Konflik antara pengikut Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah biasanya terjadi akibat kegiatan keagamaan jemaat Ahmadiyah. Ormas garis keras, FPI, tidak bisa menerima kegiatan tersebut dan berusaha mencegah atau membubarkannya karena tidak sesuai dengan SKB Tiga Menteri tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus JAI dan Warga Masyarakat, serta Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat. Rentetan konflik yang terjadi antara JAI dan non-JAI di Tasikmalaya pada 2012-2014 adalah sebagai berikut (Wijonarko, 2013, h. 67):

1. Pada 20 April 2012, sekitar jam 10.00, terjadi pelemparan dan perusakan masjid Baitul Rohim Kp. Babakan Sindang, Desa Cipakat, Kec. Singaparna oleh massa FPI dan warga sekitar.
2. Pada 2012, terjadi pembakaran barang-barang yang ada di dalam masjid Al Mujahidin milik JAI Kp. Babakansari, Kutawaringin, Kec. Salawu.

3. Pada 5 Mei 2013, pukul 01.00, terjadi perusakan masjid dan rumah warga JAI oleh massa sekitar 100-300 orang.

Konflik terbesar terjadi pada Mei 2013. Penyerangan ini berlangsung selama 10-15 menit dan menyebabkan sekitar 24 rumah rusak. Personil polisi tidak bisa membendung aksi anarkis dan hanya bisa menahan warga Ahmadiyah supaya tidak terjadi bentrokan. Rumah-rumah warga yang rusak akibat lemparan tersebut posisinya menghadap ke jalan, sehingga bagian yang rusak hanya jendela di ruang tengah dan ruang tamu. Saksi kejadian menyatakan bahwa jumlah massa saat penyerangan sekitar 100-300 orang.

Permasalahan Ahmadiyah yang memicu pertentangan dan konflik antaramat beragama, khususnya umat Islam, mendorong FKUB Kabupaten Tasikmalaya menjadi forum yang membantu penyelesaian konflik tersebut. Oleh karena itu, FKUB Kabupaten Tasikmalaya berupaya mendengarkan aspirasi para pihak yang berkonflik dan berbagai pendapat dari pemuka agama, para kyai, serta tokoh masyarakat.

Keikutsertaan FKUB Kabupaten Tasikmalaya dalam permasalahan Ahmadiyah tersebut sesuai mandat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. FKUB memainkan peranan penting dalam meredam potensi konflik atas nama agama itu, sesuai Pasal 9 Ayat (1) dan (2).

Menurut Edeng (Ketua FKUB Tasikmalaya), FKUB di Tasikmalaya yang terdiri dari berbagai pemuka agama daerah setempat, seperti pimpinan daerah dari berbagai organisasi keagamaan (NU, Muhammadiyah, Persis, Persatuan Umat Islam, Walubi, GKI, dan FPI) dan para kyai pimpinan pondok pesantren, mempunyai kepentingan untuk menjaga keutuhan kerukunan umat beragama di Tasikmalaya. Hal tersebut berdasar pada tugas dan fungsi FKUB, yakni melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur, dan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama.

FKUB, berdasarkan saran dan masukan dari para anggotanya, berupaya untuk tidak menempuh jalan kekerasan atau paksaan. FKUB melakukan upaya pendekatan pada dua belah pihak yang berkonflik, yaitu JAI dan FPI. Pendekatan kepada FPI yang notabene adalah salah satu anggota FKUB, relatif lebih mudah, yaitu duduk bersama, saling berdialog, dan memberikan masukan pada FPI untuk menahan diri agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Oleh karena itu, upaya FKUB berfokus pada cara untuk bisa masuk ke dalam kelompok JAI di Tenjowaringin tanpa paksaan, sehingga dapat membina serta memberi pemahaman tentang kerukunan umat beragama.

Beberapa upaya komunikasi tersebut di antaranya, *pertama*, mendengarkan aspirasi kedua pihak yang berkonflik. Berdasarkan wawancara dan observasi langsung yang dilakukan peneliti, FKUB berupaya melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat mengenai permasalahan konflik Ahmadiyah. Selain itu, FKUB juga berupaya menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat dengan mengadakan rapat dengar pendapat dari masing-masing pihak. FKUB juga mencoba beraudiensi dengan pihak FPI dan JAI yang berseteru dalam konflik. FKUB mendengarkan setiap hal yang diinginkan oleh FPI dan begitu juga dengan JAI. Jika memungkinkan, kedua pihak tersebut diundang untuk duduk bersama dan berdialog. Namun, jika masing-masing tidak bersedia duduk bersama atau dinilai akan lebih baik keduanya tidak dipertemukan langsung karena situasi yang masih memanas kala itu, maka kedua pihak diundang secara terpisah. FKUB tetap berupaya menampung berbagai aspirasi dari FPI dan JAI, walaupun banyak pertemuan diadakan secara terpisah.

Kedua, silaturahmi sebagai survei sebelum penyusunan strategi. FKUB, dalam upaya komunikasi damai, berusaha mengetahui pendekatan yang cocok kepada pihak JAI. Oleh karena itu, bekerja sama dengan Asep dan Tatang (warga non-JAI yang tinggal di daerah konflik), FKUB mengadakan survei ke rumah-rumah warga JAI dengan alasan silaturahmi. Anggota FKUB berusaha berdialog dan mencari tahu alasan para warga masuk ke dalam JAI, potensi komoditas di desa, keterampilan yang dimiliki warga, dan aktivitas warga sehari-hari.

Menurut Asep dan Tatang, alasan kebanyakan warga Tenjowaringin menjadi JAI bukan karena keyakinannya sendiri, melainkan faktor keturunan dan ekonomi. Orang tua mereka adalah JAI, sehingga mereka juga menjadi JAI. Mayoritas para pemuka JAI menguasai sektor-sektor ekonomi, pertanian, dan peternakan, sehingga mau tidak mau warga sekitar yang tidak berkecukupan dan kelanjutan hidupnya bergantung pada usaha yang dimiliki para pemuka JAI harus masuk JAI.

Selain itu, menurut Wahyuddin (anggota FKUB yang ditugaskan terjun untuk melakukan dan menindaklanjuti survei), kebanyakan anggota JAI tergolong masyarakat akar rumput yang memiliki tingkat ekonomi dan pendidikan rendah. Kebanyakan mereka bekerja menjadi buruh tani di lahan-lahan milik pemuka JAI. Sebagian besar warga tersebut memeluk keyakinan Ahmadiyah karena majikan mereka adalah pemuka JAI, sehingga, sebagai buruh, mereka mengikuti saran majikan mereka. Alasan ekonomi menjadi alasan kuat bagi mereka untuk menjadi anggota JAI.

Ketiga, pemberdayaan di bidang ekonomi. Setelah survei dilakukan, FKUB memutuskan bahwa pendekatan dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi lebih dahulu. Pendekatan ini diusahakan sesuai kemampuan, keterampilan, dan komoditas yang bisa dikembangkan. Sebagian warga sekitar Tenjowaringin dan Kutawaringin memiliki keterampilan beternak domba, mengembangkan perikanan, dan pengolahan pisang yang tumbuh subur di daerah



Gambar 1 Foto Kolam Ikan dan Warga yang Sedang Membangun Kolam Bersama

Sumber: Dok. peneliti

tersebut menjadi berbagai keripik. Awalnya pemberdayaan ekonomi ini, menurut Wahyuddin, dimulai dengan memberikan beberapa domba pada warga untuk dikelola dengan sistem '*nengah*'. FKUB tidak memberikan secara cuma-cuma. Warga diminta untuk memelihara domba-domba tersebut hingga beranak dan anak-anak domba akan dibagi dua, sebagian menjadi milik FKUB dan sebagian lagi menjadi milik warga yang memelihara. Awalnya, warga yang ikut serta dalam ternak domba ini tak banyak, namun ketika sistem ternak domba ini memberikan hasil dan keuntungan bagi warga yang memelihara, banyak warga lain yang tertarik.

Setelah upaya ternak domba terlihat cukup memberi hasil yang memuaskan, FKUB mulai mencoba mengembangkan potensi ekonomi lain, yakni perikanan dan perkebunan pisang. Melihat banyaknya

peluang yang ada dan sebelum berpikir cara menyediakan lahan, FKUB lebih dahulu mengatur cara distribusi produk-produk yang akan dihasilkan. Melalui berbagai koneksi di pasar Cikurubuk, FKUB berhasil membuka jalan bagi distribusi hasil ikan dan keripik pisang di pasar tersebut. Setelah pola distribusi ditemukan, Wahyuddin, sebagai perwakilan dari FKUB, mendatangi *kuwu* (kepala desa) masing-masing desa dan menyampaikan maksudnya untuk meminta bantuan warga dalam membangun kolam ikan dan kebun pisang.

Melihat antusiasme warga, banyak pihak turut menyumbang dana untuk perluasan kolam dan kebun tersebut. Setelah kurang lebih setahun, luas kolam dan kebun pisang tersebut kini sudah hampir mencapai satu hektar dan masyarakat desa pun sudah mulai merasakan manfaatnya.

Konflik yang melibatkan FPI dan JAI membuat hubungan keduanya semakin tidak baik. Menurut Edeng, Ketua FKUB Tasikmalaya, banyak warga JAI yang mendengar nama FPI saja takut dan menunjukkan sikap antipati terhadap anggota, atribut, atau hal lain yang berkaitan dengan FPI. Stereotip FPI yang selalu melakukan perusakan dan cara-cara anarkis membekas dalam ingatan warga JAI, sehingga membuat pertemuan antara kedua pihak semakin sulit. Melihat hal tersebut, FKUB yang salah seorang anggotanya merupakan anggota FPI, sengaja mengutus anggota FPI tersebut untuk mendekati warga dengan 'memakai baju' FKUB. Anggota tersebut adalah Wahyuddin.

Melalui Wahyuddin, FKUB dapat menjalin hubungan komunikasi dengan pihak FPI, sekaligus mencoba merekatkan hubungan antara FPI dan JAI. Wahyuddin ditugaskan oleh FKUB untuk terjun langsung dalam pencetusan ide dan eksekusi rencana pembuatan kolam dan kebun pisang tersebut. Pada mulanya, keanggotaan FPI Wahyuddin ditutup rapat agar tidak menuai sikap antipati dari warga. Namun, setelah warga mulai menyambut baik ide pemberdayaan ekonomi yang digagas oleh Wahyuddin, ia mulai membuka identitasnya sebagai anggota FPI.

PEMBAHASAN

Upaya komunikasi yang diimplementasikan oleh FKUB mendapatkan sambutan baik dari pihak yang berkonflik. Hal tersebut tidak terlepas dari upaya komunikasi persuasif yang selalu dikedepankan oleh FKUB dalam

resolusi konflik. Pendekatan yang berusaha mengubah sikap dan pikiran para pihak berkonflik ini dinilai lebih ramah dan efektif dari pada upaya represif atau menekan yang dilakukan di daerah lain dalam penanggulangan konflik Ahmadiyah. Pengusiran yang terjadi di Lombok (Amrulloh, Mustain & Wardatun, 2010) dan perusakan yang menjatuhkan korban jiwa di Cikeusik tidak mematenkan semangat jiwa jemaat Ahmadiyah (Kontras, 2008). Justru sebaliknya, cara yang kasar dan tidak manusiawi itu membuat jemaat lebih kompak dalam menggalang persatuan dan *aqidah* mereka.

Upaya FKUB di Tasikmalaya berkebalikan dengan upaya yang dilakukan di Lombok dan Cikeusik. FKUB mengupayakan jalan damai dan pemberian pemahaman secara dialogis, bahkan melalui pendekatan-pendekatan unik, seperti pemberdayaan ekonomi dan pendidikan. Menurut Soemirat dan Ardianto (2012), tujuan komunikasi persuasif adalah untuk membentuk tanggapan, memperkuat tanggapan, dan mengubah tanggapan. Pada upaya FKUB, strategi komunikasi aktor-aktor sedikit demi sedikit mengubah tanggapan. Hal ini terlihat dari perilaku dan sikap warga JAI terhadap aktor-aktor penyelesai konflik dan terhadap aliran Ahmadiyah sendiri.

Lebih lanjut, strategi pesan persuasif haruslah dikemas secara menarik, membangkitkan perhatian khalayak, dan menyentuh kebutuhan khalayak sebagai komunikasi (Effendy, 2002). Pada penyelesaian konflik Ahmadiyah di Tasikmalaya, FKUB mampu dengan tepat menarik dan menyentuh

kebutuhan pribadi warga JAI. Pesan berupa pemberdayaan ekonomi terbukti tidak hanya berbicara atas nama kepentingan warga JAI, tetapi menyarankan suatu cara memperoleh kebutuhan dalam kondisi riil kelompok JAI yang tingkat ekonominya lemah dan sangat tergantung pada para pemuka JAI di daerahnya.

Hal tersebut tidak terlepas dari analisis mendalam FKUB mengenai khalayak sasaran yang dilakukan sebelum penyusunan strategi. Analisis khalayak ini diperlukan untuk mengetahui siapa, seperti apa, dan bagaimana karakter khalayak yang akan dihadapi dalam komunikasi, sehingga pesan, media, dan pemilihan sumber/komunikatonya tepat dan efektif (Bauer, dalam Depari dan Colin, 1988). Silaturahmi FKUB kepada warga yang berkonflik bertujuan mengetahui keinginan dan kondisi riil warga. Upaya penyamaran identitas Wahyuddin, wakil dari FPI, sebagai salah satu anggota FKUB juga dipilih berdasarkan analisis khalayak warga JAI.

FKUB mengupayakan resolusi konflik dengan pendekatan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Ciri khas ADR adalah partisipasi pihak ketiga (Littlejohn dan Domenici, 2007). ADR merupakan bentuk pendekatan yang berlawanan dengan pendekatan *adversarial* yang cenderung lebih konfrontatif yaitu melalui paksaan, kecaman, dan litigasi. Metode ADR FKUB mengedepankan proses negosiasi yang kebanyakan ditempuh secara informal.

Selain itu, penerapan pendekatan *collaborative bargaining* dalam bernegosiasi cukup efektif mengupayakan

suasana kondusif pascakonflik. Pendekatan ini berupaya tidak saling menjatuhkan pihak-pihak yang berkonflik dan mencoba mempertemukan semua kepentingan (Littlejohn dan Domenici, 2007). Hal ini terlihat dari kerja sama yang dibangun antara FKUB, MUI, dan polisi dalam mendengarkan dan menghargai keinginan dan aspirasi para pihak yang berkonflik, serta berusaha mengakomodasinya secara berimbang.

Berdasarkan model dan penjelasan di atas, FKUB secara tidak langsung mengambil pilihan untuk melakukan komunikasi yang berorientasi pada hubungan antara para pihak yang berkonflik, sehingga melahirkan tindakan komunikasi asertif (*assertive communication behavior*) dengan strategi kolaboratif yang berada di antara pemaksaan (*forcing*) dan akomodasi (*accommodating*), yaitu memberikan pemaksaan atau pengarahannya kepada pihak berkonflik, namun tetap berupaya mengakomodasi keinginan para pihak tersebut.

Upaya komunikasi persuasif konflik Ahmadiyah di Tasikmalaya juga melahirkan orientasi komunikasi berbeda yang dipilih masing-masing aktor dalam merespons konflik yang ada. *Relationship-centered orientation* ini berasumsi bahwa kepentingan diri dan kepentingan pihak lain adalah penting dan keduanya dapat terwujud dengan seimbang (Abigail dan Cahn, 2011). FKUB, melalui strategi *compromising*, mencoba memosisikan diri sebagai negosiator konflik.

Posisi FKUB sebagai negosiator tersebut memperlihatkan bentuk komunikasi

problem solving yang dipilih para aktor dalam upaya menyelesaikan konflik. Bentuk komunikasi *problem solving* merupakan strategi yang berusaha mempertahankan perdapatnya sendiri, sekaligus berusaha mendapatkan cara melakukan rekonsiliasi dengan pihak yang berkonflik (Pruitt, Rubin & Kim, 2004). Para aktor penyelesai konflik berusaha meredam gejolak melalui strategi masing-masing tanpa meninggalkan kepentingannya sendiri terhadap konflik Ahmadiyah dan isu Ahmadiyah itu. FKUB juga menggunakan penghubung atau pihak ketiga yang dipercaya untuk menjadi wakil agar lebih mudah mencapai kesepakatan dengan pihak JAI. Hal ini adalah salah satu ciri khas bentuk komunikasi *problem solving* yang berusaha mencari cara untuk menjembatani keinginan tiap pihak.

Upaya komunikasi persuasif tersebut mendatangkan hasil di luar perkiraan. Meskipun penyelenggaraan upaya komunikasi persuasif memakan waktu lebih lama karena memerlukan analisis khalayak, strategi, dan sumber yang akan dipakai, upaya aktor-aktor tersebut ternyata mendapat simpati dari banyak anggota JAI dan membangun stabilitas kondisi hingga kini. Oleh karena itu, upaya komunikasi persuasif FKUB memiliki nilai plus dibandingkan upaya represif yang mungkin dilakukan di daerah lain.

SIMPULAN

FKUB Kabupaten Tasikmalaya yang berkepentingan dalam terciptanya kerukunan umat beragama di Indonesia merasa perlu turun tangan meredam konflik antara

Ahmadiyah dan FPI. FKUB menyusun strategi komunikasi yang berkontribusi positif pada proses penyelesaian konflik. Upaya yang digunakan bersifat persuasif dan dialogis. Di luar pencapaian-pencapaiannya, upaya komunikasi tersebut belum sepenuhnya maksimal dan bisa menjamin konflik serupa tak terulang kembali.

Oleh karena itu, peneliti memberikan beberapa rekomendasi. *Pertama*, proses penyelesaian konflik Ahmadiyah di Tasikmalaya kini hanya bersifat reaktif. Proses tersebut hanya beraksi ketika terjadi konflik dan belum ada suatu sistem pencegahan, penanggulangan, dan pembinaan pascakonflik yang tertata. Penanganan konflik diharapkan dapat memiliki tahapan lebih kompleks beserta pencegahan dan pembinaan pascakonflik.

Kedua, proses komunikasi untuk penyelesaian konflik tersebut hendaknya bisa lebih terkoordinir dan terintegrasi, sehingga fungsi FKUB dapat maksimal. *Ketiga*, kajian komunikasi lanjutan dan lebih komprehensif perlu dilakukan. Indonesia yang memiliki keberagaman tinggi dan rentan konflik membuat kajian mengenai penanganan konflik sangat penting dikembangkan. Pola-pola komunikasi konflik dan strategi pendeteksian konflik dengan pendekatan komunikasi perlu dikaji agar konflik, terutama konflik agama, dapat diminimalisir dampak negatifnya.

DAFTAR RUJUKAN

Abigail, R. A. dan Cahn, D. D. (2011). *Managing conflict through communication fourth edition*. Boston, USA: Allyn & Bacon.

- Ahmad, A. S. (1994). *Kebijaksanaan dan perencanaan komunikasi*. Ujung Pandang, Indonesia: Hasanuddin University Press.
- Amrulloh, M.A., Mustain & Wardatun, A. (2010). Dampak sosial kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah di Lombok dan upaya resolusi konflik. *Jurnal Penelitian Keislaman*, 6 (2), Juni 2010, h. 361-386.
- Depari, E dan Colin, M.A. (1988). *Peranan komunikasi massa dalam pembangunan*. Yogyakarta, Indonesia: Gadjah Mada University Press.
- Effendy, O. U. (2002). *Hubungan masyarakat suatu studi komunikologis*. Bandung, Indonesia: Remaja Rosda Karya.
- (2003). *Ilmu, teori, dan filsafat komunikasi*. Bandung, Indonesia: Citra Aditya Bakti.
- Fazzi, R. (2011). *Getting to yes: Negotiating agreement without giving in*. New York, USA: Penguin Books.
- Krisberg, L. (2006). The development of the conflict resolution field. Dalam Daniel D. dan Paul F. D., *Conflict Resolution Volume I*, (hlm 107). London, UK: Sage Publications.
- Kontras. (2008). *Bunga rampai sejarah ahmadiyah Indonesia 1925-2000*. Jakarta, Indonesia: Kontras.
- Littlejohn, S. W & Domenici, K. (2007). *Communication, conflict, and the management difference*. USA: Wavelend Press.
- Masjid Ahmadiyah. (2013, 5 Mei). Masjid ahmadiyah Tasikmalaya dirusak. *Antaraneews.com*. <http://www.antaraneews.com/berita/373061/masjid-ahmadiyah-tasikmalaya-dirusak>
- Nicholson, M. (1991). Negotiation, agreement and conflict resolution: The role of rational approaches and their criticism. Dalam Raimo V. (Ed), *New Directions in Conflict Theory: Conflict Resolution and Conflict Transformation*, (hlm. 59) London, UK: Sage Publication.
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006.
- Pruitt, D., Rubin, J. & Kim S.H. (2004). *Social conflict: Escalation, stalemate, and settlement*. (3rd Ed). New York, USA: McGraw-Hill.
- Rahmat, J. (2000). *Psikologi komunikasi*. Bandung, Indonesia: Remaja Rosda Karya.
- (2001). *Metode penelitian komunikasi*. Bandung, Indonesia: Remaja Rosda Karya.
- Soal Ahmadiyah. (2013, 30 Mei), Soal ahmadiyah, sekali lagi pemerintah imbau patuhi SKB 3 menteri. *Detik.com*. <http://news.detik.com/berita/2260448/soal-Ahmadiyah-sekali-lagi-pemerintah-imbau-patuhi-skb-3-menteri>
- Soemirat, S. dan Ardianto, E. (2012). *Dasar-dasar public relation*. Bandung, Indonesia: Remaja Rosda Karya.
- Suprpto, H., Priatmojo, D., dan Al-Yamani, Z. (2011, 11 Februari). Ahmadiyah: Darah dan ibadah. *Viva.co.id*. <http://sorot.news.viva.co.id/news/read/204268-Ahmadiyah--darah-dan-ibadah>
- Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2008, Jaksa Agung Nomor Kep-033/A/Ja/6/2008 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 199 Tahun 2008, tentang peringatan dan perintah kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat.
- Wijonarko. (2013). *Implementasi penanggulangan konflik JAI di wilayah Tasikmalaya dalam rangka KAMTIBMAS*. Bandung, Indonesia: Agro Publishing.
- Zulkarnain, I. (2005). *Gerakan ahmadiyah di Indonesia*. Yogyakarta, Indonesia: LkiS.